

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan responden mengenai persepsi masyarakat Kecamatan Tanjung Selor terhadap pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), maka dapat disimpulkan bahwa:

##### **1. Aspek Pengetahuan**

- a. Sesuai dengan hasil penelitian, masyarakat Kecamatan Tanjung Selor yang mengetahui tentang pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) sudah baik.
- b. Pengetahuan masyarakat yang ada di Kecamatan Tanjung Selor tentang daerah yang menjadi Ibukota Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dalam hasil penelitian sudah sangat baik.

##### **2. Aspek Respon**

- a. Dari data hasil penelitian mengenai sikap masyarakat Kecamatan Tanjung Selor terhadap pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dan penempatan Ibukota Provinsi mayoritas menanggapi dengan baik dan sangat mendukung hal ini

- b. Tanggapan masyarakat Kecamatan Tanjung Selor dalam kelayakan Ibukota Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dari jumlah responden banyak yang menanggapi layak karena diantara Kabupaten/Kota yang ada di Kalimantan Utara kecamatan Tanjung Selor lebih dominan dari kelengkapan untuk sarana prasarana dan juga infrastruktur yang ada.

### 3. Aspek Partisipasi

- a. Dari hasil penelitian responden di Kecamatan Tanjung Selor masyarakat kurang aktif dalam pembentukan dan pembangunan di Kalimantan Utara (Kaltara).
- b. Data dari hasil penelitian setiap jawaban dari kuisisioner masyarakat lebih menitik beratkan mengenai sosialisasi yang kurang dari pemerintah mengenai pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara).

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis ingin memberikan saran kepada Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) yaitu:

1. Lebih baiknya pemerintah pusat dan juga daerah harus juga memperhatikan kemauan dari masyarakat umum dalam proses pembentukan dan pembangunan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) agar

masyarakat umum juga dapat lebih merasa berperan dalam pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) ini.

2. Pemerintah terus memantau, menjaga, dan juga mengembangkan potensi-potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki kelima kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kalimantan Utara sehingga penunjang untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan juga Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai penggerak sehingga dapat terorganisir lebih baik.
3. Untuk sarana dan prasarana pemerintahan sebaiknya Pemerintah Daerah maupun Pusat lebih memperhatikan infrastruktur bangunan gedung, yang belum memadai di setiap wilayah dan perlu pembenahan agar kelayakan infrastruktur gedung dapat berfungsi baik.